



MENUJU KETANGGUHAN  
**EKONOMI**

---

S U M B A N G S A R A N



**E K O N O M**  
I N D O N E S I A



**MENUJU KETANGGUHAN EKONOMI:  
SUMBANG SARAN 100 EKONOM INDONESIA**

---

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# MENUJU KETANGGUHAN EKONOMI: SUMBANG SARAN 100 EKONOM INDONESIA

Copyright© 2017, INDEF Diterbitkan oleh Penerbit Buku Kompas, 2017  
PT Kompas Media NusantaraJl. Palmerah Selatan 26-28 Jakarta 10270  
e-mail: buku@kompas.com

Editor: Tim INDEF Perancang sampul: Tim INDEF

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

528 hlm.; 15 cm x 23 cm ISBN: 978-979-219-5 (Soft Cover)  
ISBN: 978-979-220-1 (e-Book)  
KMN: 581712012

## **Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT)**

Menuju ketangguhan ekonomi: sumbang saran 100 ekonom Indonesia / editor: Indef. -- Jakarta : Kompas Media Nusantara2017. 536 hlm. ; 23 cm.

ISBN 978-602-412-219-5

1. Indonesia -- Keadaan ekonomi. I. Enny Sri Hartati.  
338.959 8

Isi di luar tanggung jawab Percetakan PT. Gramedia, Jakarta

# Daftar Isi

Pengantar Presiden RI: Joko Widodo	xiii
Pengantar: Chairul Tanjung	xix
Pengantar: INDEF	xxiii

## PENDAHULUAN

• Menguji Ketangguhan Ekonomi Indonesia Indef	2
--------------------------------------------------	---

## FISKAL

• Membangun Kembali Kredibilitas Kebijakan Fiskal Anggito Abimanyu	16
• Pembangunan Nasional dan Ketangguhan Fiskal Arif Budimanta	19
• Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah Candra Fajri Ananda	24
• Arah Reformasi Pajak: Meningkatkan Penerimaan, Mengurangi Sengketa Darussalam	30
• Fiskal Ekspansif untuk Pertumbuhan Inklusif Djisman Simanjuntak	35
• Stabilitas Fiskal Berbasis Teknologi dan Intelijen Dradjad H. Wibowo	38
• Kredibilitas Stimulus Fiskal Enny Sri Hartati	43
• Menuju Fiskal yang Tangguh Imaduddin Abdullah	48
• Optimasi Belanja Pemerintah untuk Pemerataan Pembangunan Antarwilayah Muhammad Firdaus	53
• Refleksi dan Ekspektasi Reformasi Fiskal Hidayat Amir	58
• Penguatan Daya Saing dan Kapasitas Fiskal Daerah Kodrat Wibowo	66
• Memperkuat Kebijakan Fiskal melalui Sistem Penggajian Nasional Lukman Hakim	70
• Kunci Sukses Ekstensifikasi Cukai Muliadi Widjaja	74
• Menjaga Kesenambungan Fiskal untuk Pertumbuhan yang Berkualitas Prasetijono Widjojo	78

• Dampak Fiskal Masih Dapat Dioptimalkan Purbaya Yudhi Sadewa	82
• Kebijakan Fiskal sebagai Pendukung Ketangguhan Ekonomi Indonesia Sri Adiningsih	86
• Ketidakpastian Fiskal Daerah Tauhid Ahmad	90
• Kebijakan Peningkatan Penerimaan Negara Vid Adrison	94
• "Tax Amnesty" Jembatan Komprehensif "Tax Reform" Yustinus Prastowo	98

## **PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING**

• Mitigasi Gejolak, Memanfaatkan Momentum A. Prasetyantoko	106
• Kawasan Industri Pendongkrak Daya Saing Ahmad Heri Firdaus	109
• Revitalisasi Industri Manufaktur Indonesia Ari Kuncoro	113
• Produktivitas dan Daya Saing Bangsa: Persoalan dan Solusi Asep Saefuddin	116
• Membumikan Poros Maritim Arif Satria	120
• Seabad Indonesia 2045: Menuju Peringkat 4 Besar Dunia Christianto Wibisono	124
• Percepat Industrialisasi Nasional Dendi Ramdani	128
• Masukan Terkait Efisiensi Logistik dan Pembangunan Konektivitas Denni Puspa Purbasari	131
• Mempercepat Reindustrialisasi Berbasis Sumber Daya Daerah Destry Damayanti	135
• Ekonomi, Kebijakan, dan Birokrasi Malas Didik J. Rachbini	138
• Menumbuhkan Pasar Sosial sebagai Inkubator Bisnis Evi Noor Afifah	147
• Tidak Ada Jalan Pintas Faisal H. Basri	152
• Memperkuat Industri Manufaktur Nasional Firmanzah	157
• Evaluasi Dua Tahun Jokowi-JK: Bertahan di Tengah Badai Fithra Faisal Hastiadi	161
• Kemandirian Ekonomi: "Quo Vadis" Produksi dalam Negeri Ginandjar Kartasasmita	165
• Memikirkan Kembali Tujuan Akhir dari Reformasi Perekonomian Helmi Arman	172

• Mendorong Kualitas Konsumsi Rumah Tangga dan Pertumbuhan Ekonomi Hendri Saparini	175
• Produktivitas dan Daya Saing Industri Ina Primiana	180
• Memanfaatkan Potensi Industri Halal dan Ziswaf dalam Pembangunan Ekonomi Irfan Syaqui Beik	185
• Menjaga Optimisme melalui Kelanjutan Kinerja Pemerintah Jefri Butarbutar	189
• Reformasi Produktivitas dan Daya Saing untuk Menghindari "Middle Income Trap" Juda Agung	192
• Penguatan Industri Penghasil Bahan Baku Atasi Masalah Struktural Lana Soelistianingsih	197
• Segera Wujudkan Perbaikan Sektor Energi Nasional! Marwan Batubara.	201
• Akselerasi Agroindustri M. Fadhil Hasan	204
• Norma Baru Dunia: Implikasi bagi Daya Saing dan Perubahan Struktur Indonesia Mari Pangestu	208
• Persaingan Usaha dan Inovasi Daya Saing M. Nawir Messi	217
• Mengatasi Ketimpangan Ekonomi dengan Reformasi Pasar Muhammad Syarkawi Rauf	224
• Strategi Reindustrialisasi Indonesia Mudrajad Kuncoro	227
• Daya Saing SDM Industri Ninasapti Triaswati	233
• Memperkuat Paket Kebijakan Ekonomi 2016/2017 Padang Wicaksono	236
• Membangun Daya Saing Ekonomi melalui Pembangunan Institusi Rimawan Pradiptyo	240
• Strategi "Positive-Sum" Penguatan Daya Saing Industri Rina Indiasuti	244
• Daya Saing Pertanian dan Ketahanan Pangan Pascaperundingan WTO Nairobi Rina Oktaviani	248
• Produktivitas dan Daya Saing Indonesia dalam Konteks Demografi Sonny Harry B. Harmadi	252
• Peran BUMN Mendukung Industrialisasi Tanri Abeng	261
• Sinergi Mikroregionalisasi dan Mikroregionalisme di Kawasan Perbatasan Tirta N. Mursitama	264
• Hilirisasi: Keunggulan Komparatif ke Daya Saing Tri Widodo	267
• Catatan untuk Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Industri Yose Rizal Damuri	271

## LIKUIDITAS

- Perubahan Kebijakan Stabilisasi Perekonomian sejak Krisis Ekonomi 1998  
Anwar Nasution 276
- Mengapa Konsolidasi BUMN dan Bank Diperlukan?  
A. Tony Prasetyantono 281
- Persoalan Likuiditas Valas di Indonesia  
Abdul Manap Pulungan 284
- Mendorong Sektor Perbankan Lebih Kuat  
Andry Asmoro 288
- Persoalan Likuiditas Perbankan  
Anton Hendranata 292
- Normalisasi Peran Perbankan sebagai Intermediasi Perekonomian  
Aviliani 298
- Kredit Usaha Rakyat Harus Dikaji Ulang  
Awalil Rizky 302
- Likuiditas Perekonomian dan Dogma Ekonomi yang Dangkal  
Achmad Deni Daruri 307
- FinTech: Jalan Keluar Dangkalnya Sektor Keuangan  
Bhima Yudhistira Adhinegara 310
- Memecah Kebuntuan Likuiditas untuk Memacu Pertumbuhan Inklusif  
Budi Hikmat 314
- Industri Keuangan Inklusi sebagai Mesin Daya Saing Perekonomian  
F.X. Sugiyanto 320
- Ikhtiar Menjaga Nilai Tukar  
Eko Listiyanto 327
- Upaya Meningkatkan Likuiditas  
Hermanto Siregar 331
- Inklusi Keuangan untuk Mendorong Pertumbuhan Inklusif  
Josua Pardede 334
- Membangun Sistem Moneter dan Keuangan Indonesia yang Terintegrasi dan Fungsional  
Marsuki 338
- Mengoptimalkan Potensi, Memperkuat Resiliensi  
Mirza Adityaswara 342
- Likuiditas Perekonomian: Prospek Jangka Pendek dan Perspektif Jangka Panjang  
Mochammad Doddy Ariefianto 349
- Menilai Ekonomi: Tidak Hanya dari Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar dan Potensi Pemanfaatan Renminbi  
Telisa Aulia Falianty 353
- Kebijakan Moneter dan Transmisi Kredit Perbankan  
Umar Juoro 357
- Memperkuat Potensi Dalam Negeri dalam Menghadapi Ketidakpastian Global  
Winang Budoyo 361

- Strategi Pemanfaatan Instrumen Moneter untuk Mendukung Fiskal  
Yanuar Rizky 366

## **PERTUMBUHAN BERKUALITAS**

- Keadilan dan Pembangunan Desa  
Ahmad Erani Yustika 376
- Pertumbuhan yang Berkualitas  
Arief Daryanto 380
- Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan  
Asep Suryahadi 385
- Tantangan Mengurangi Kemiskinan, Kerentanan, dan Ketimpangan  
Bambang Widianto 393
- Pertanian Menjawab Tantangan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas  
Bayu Krisnamurthi 399
- Kualitas Pertumbuhan dalam Ketidakpastian Global  
Bustanul Arifin 403
- Ekonom, Pertumbuhan Ekonomi, dan Tujuan Bernegara  
Didin S. Damanhuri 412
- Strategi Pembangunan Ekonomi: Perlu Langkah Korektif  
Halim Alamsyah 417
- Tindak Lanjut Kebijakan Membangun dari Pinggiran  
D.S. Priyarsono 426
- Mewujudkan Kedaulatan Pangan  
Dwi Andreas Santosa 430
- Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas  
Elan Satriawan 435
- Membangun Bangsa dari Desa: Mewujudkan Pertumbuhan Berkualitas  
Gunawan Sumodiningrat 438
- Kembali ke Ekonomi Konstitusi 1945  
Ichsanuddin Noorsy 442
- Makna Hakiki Pembangunan untuk Kedaulatan Pangan  
Jossy Prananta Moeis 446
- Kesenjangan Sosial Ekonomi  
Kwik Kian Gie 450
- Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas  
Lincoln Arsyad 454
- Kesenjangan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Mobilitas Sosial  
Mohamad Ikhsan 458
- Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Indonesia  
M. Dawam Rahardjo 465
- Membangun Pertumbuhan Berkualitas dan Berkesinambungan  
Miyasto 469
- Reorientasi Pertumbuhan  
Revrison Baswir 475

• Tantangan dan Prospek Ekonomi 2017 Ryan Kiryanto	478
• Memperbaiki Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Sugiyono	482
• Tantangan Menciptakan Pekerjaan Layak Suharyadi	486
• Bulog dan Stabilisasi Harga Pangan Sunarsip	490
• Mengatasi Ketimpangan di Indonesia Vivi Alatas	494
• "Stunting" dan Gagal Tumbuh Ekonomi Wijayanto Samirin	499
Indeks	503

# Pemikiran Presiden Jokowi di Hadapan 100 Ekonom

YANG pertama saya ingin menanggapi sedikit mengenai saran dari Didik J. Rachbini dari Indef mengenai blusukan ke industri. Saya perlu menginformasikan bahwa saya adalah orang industri yang sudah 24 tahun bergerak di situ dan juga betul-betul pekerja di industri fisik, hanya memang bukan industri yang besar, tapi industri. Untuk blusukan ke industri akan saya lakukan sehingga saya mengetahui bukan hanya masalah kayu, melainkan juga masalah migas, masalah-masalah industri otomotif, dan industri tekstil.

Yang kedua, yang berkaitan dengan kondisi ekonomi makro Indonesia secara umum. Dalam artikel empat IMF yang dipublikasikan seminggu yang lalu secara umum mengatakan bahwa kondisi ekonomi Indonesia baik dari sisi moneter, sisi fiskal, maupun struktural. Publikasi yang dikeluarkan IMF tersebut tentu informasi yang baik, tapi juga kita tidak boleh senang dulu dengan hal-hal seperti ini.

Saat ini risiko ekonomi sebagian besar berasal dari eksternal, dari luar negeri, karena ketidakpastian kebijakan ekonomi, misalnya di Amerika, baik juga yang berkaitan dengan ketidakpastian karena naiknya suku bunga the Fed dan melemahnya ekonomi China dalam beberapa tahun terakhir. Menurut saya yang paling penting adalah apa yang harus kita kerjakan. Dalam hal ini, penting untuk terus menyikapinya dengan sikap optimistis. Walaupun memang tekanan terjadi di hampir semua negara sama. Hal ini yang saya rasakan setiap bertemu dengan kepala negara, kepala pemerintahan, di mana keluhannya hampir sama, antara lain adalah melemahnya pertumbuhan ekonomi, sulitnya mencari investasi, dan mencari arus uang masuk. Oleh sebab itu yang paling penting kita lakukan saat ini adalah menarik investasi sebesar-besarnya ke negara kita.

Saya sudah memberikan perintah jelas kepada tim ekonomi, terutama Kepala BKPM, bahwa target-target investasi yang masuk ini harus betul-betul dikejar dengan cara apa pun. Misalnya tahun depan, target investasi yang masuk sekitar Rp 670 triliun. Jika sudah ada target, maka berbagai strategi dan upaya harus dilakukan. Kemungkinan pada 2018 target kita kira-kira Rp 840 triliun sehingga

porsinya dalam PDB nasional mencapai 45 persen. Dengan besarnya investasi ini, memberikan dorongan bagi ekonomi kita.

Selanjutnya, apa yang harus difokuskan untuk investasi ini? Selalu saya sampaikan bahwa substitusi barang-barang impor itu harus menjadi konsentrasi kita. Selanjutnya, megaprojek yang sudah direncanakan harus direalisasikan, baik yang berupa investasi-investasi 3 miliar dollar AS, 6 miliar dollar AS, 15 miliar dollar AS, dan lain sebagainya. Hal ini akan memberikan trigger ekonomi yang baik pada pertumbuhan ekonomi kita.

Banyak sekali potensi yang kita miliki, tetapi untuk memberikan kepercayaan, untuk memberikan kepastian kepada investor sekarang ini juga tidak gampang. Saya meyakini dengan perubahan-perubahan kebijakan yang kita lakukan investasi ini akan masuk ke negara kita. Baik yang berkaitan dengan petrokimia, baja, migas, maupun yang berkaitan dengan pembangkit listrik.

Berikutnya adalah yang berkaitan dengan pariwisata karena sektor ini menyerap tenaga kerja yang sangat besar. Oleh sebab itu, sepuluh destinasi baru atau sepuluh Bali baru yang setahun lalu saya sampaikan harus dapat diwujudkan. Sebenarnya kita sudah memiliki potensi pariwisata yang besar, tinggal membangun infrastruktur yang baik sebagai penopang sektor pariwisata, membangun produk-produk yang diperlukan, dan juga hal yang berkaitan dengan pemasarannya seperti membangun diferensiasi, kemasannya, branding dan juga tentu menggerakkan promosinya secara besar-besaran. Saat ini hampir di setiap bis yang ada di Paris brand Indonesia, visit Indonesia, wonderful Indonesia, itu kelihatan sekali. Kemudian juga misalnya di Time Square, New York, juga sama. Videotron-videotron di sana juga kelihatan sekali promosi untuk pariwisata kita besar-besaran.

Dari 10 destinasi tersebut, ada tiga atau empat yang sudah siap untuk menerima wisatawan, tetapi selebihnya masih memerlukan dukungan infrastruktur dan lain-lain. Dan inilah yang harus dikejar secepat-cepatnya dengan jurus apa pun dengan cara apa pun agar dapat menunjukkan bahwa kita memang mempersiapkan untuk ini. Sebagai ilustrasi, satu saja turis dari China, satu tahun sekarang bisa keluar 150 juta turis. Yang banyak tersedot memang pertama ke Amerika lalu

ke Eropa. Kenapa kita tidak bisa mengambil kesempatan ini, padahal jarak kita juga sangat dekat dengan mereka.

Kita sudah tanda tangan langsung dengan Presiden Xi Jinping untuk mendatangkan 10 juta turis sampai 2019. Dan ini menurut saya juga bukan pekerjaan yang sulit, sebetulnya. Memang sekali lagi memerlukan kesiapan-kesiapan kita. Dari 150 juta wisatawan China seluruh dunia, saya optimistis kita dapat menarik 10 juta wisatawan ke Indonesia. Terlebih kita sudah menandatangani kerja sama dengan Pemerintah China dan mereka sudah menyiapkan 9 provinsi dan 9 bandara yang bisa didatangi oleh maskapai-maskapai kita yang bisa menarik turis dari China. Karena dengan ini nantinya akan memberikan manfaat luas bagi rakyat dari bidang pariwisata ini.

Yang ketiga berkaitan dengan financial inclusion, berkaitan dengan tabungan nasional. Hal ini penting sekali karena setiap investasi membutuhkan uang, membutuhkan anggaran, dan kalau bisa kita perkuat tabungan nasional kita sehingga memberikan dukungan pada investasi-investasi yang ada di dalam negeri kita. Oleh sebab itu, selain sekuritisasi proyek-proyek yang sudah ground breaking, investasi-investasi menengah dan kecil ini juga perlu anggaran sehingga memerlukan uang yang berasal dari perbankan kita. Tetapi kalau tabungan nasional kita tidak bisa memberikan dukungan, maka justru akan menghambat investasi di dalam negeri.

Pemerintah sudah menargetkan paling tidak tabungan kita pada tahun 2019 ini minimal 75 persen naik dari posisi saat ini yang masih 36 persen. Tentunya target tersebut tidak ringan, tetapi saya meyakini apabila masyarakat digerakkan untuk menabung target ini menjadi sesuatu yang tidak mustahil. Oleh sebab itu, penting agar seluruh lapisan masyarakat, baik pelajar, petani, maupun nelayan mulai kita kenalkan dengan sistem keuangan kita.

Yang keempat yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Ini juga sebuah hal yang sangat penting yang harus kita lakukan sehingga saya menyampaikan bahwa yang namanya vocational training, vocational school ini harus besar-besaran dirombak. Hal ini karena kesalahan SMK kita adalah lebih banyak teori daripada praktik, padahal seharusnya pendidikan training-nya itu 80 persen atau 70

persen, sisanya teori. Jika kita lihat, saat ini 70-80 persen guru-guru yang ada ini adalah guru-guru normatif bidang PPKN, PMP, sejarah, kemudian bahasa Indonesia, kimia, matematika. Adapun sisanya sekitar 20-30 persen adalah guru yang mengajar praktik. Hal ini yang membedakan kita dengan Jerman dan Korea Selatan.

Oleh sebab itu, pekerjaan ini merupakan pekerjaan besar bagi Mendikbud untuk membalikkan kondisi tersebut sehingga porsi pengajaran dan guru praktik lebih besar dibandingkan porsi dan pengajaran subjek yang sifatnya normatif. Sebagai contoh, yang diperbanyak adalah guru-guru pelatih, misalnya untuk assembling, atau memberikan training mengenai permesinan, penggunaan mesin-mesin yang terbaru. Selanjutnya yang berkaitan dengan vocational training di mana pemerintah ingin bekerja sama dengan industri, dengan Kadin, agar nantinya bisa digarap secara besar-besaran. Saat ini ada beberapa program yang sudah berjalan, tetapi jumlahnya masih sangat kecil, dan ini perlu dilakukan secara besar-besaran sehingga kualitas SDM Indonesia bisa berada pada kualitas yang sangat baik.

Yang kelima, berkaitan dengan infrastruktur. Saya tidak perlu banyak berbicara mengenai hal ini karena saya sudah bicara banyak mengenai infrastruktur yang menjadi kunci. Kenapa biaya logistik kita masih lebih mahal 250 persen sampai 300 persen dibandingkan dengan negara tetangga kita? Selain itu, biaya transportasi juga masih lebih mahal 200 sampai 250 persen dibandingkan negara tetangga kita karena infrastruktur kita yang masih jelek dan belum siap. Saya meyakini apabila infrastruktur ini selesai, logistic cost dan biaya transportasi akan jauh lebih murah. Hal ini akan menjadikan daya saing kita menjadi lebih baik.

Yang tidak mudah, tetapi saya meyakini dengan paket-paket kebijakan baik di bidang ekonomi maupun di bidang hukum inilah nanti yang akan memberikan dorongan untuk pengurangan korupsi dan inefisiensi birokrasi kita.

Saya sudah beberapa kali menyampaikan hal yang kecil, seperti SPJ. Saya jengkel sekali, sudah dua tahun ini, yang berkaitan dengan SPJ. Hampir 60 persen sampai 70 persen birokrasi kita energinya habis

untuk mengurus SPJ. Saya ke lapangan, ke sawah, untuk bertemu PPL, sulit sekali. Semuanya berada di kantor. Saya tanya kenapa. Jawaban mereka adalah menyiapkan SPJ Pak. Tidak ada pengawas proyek yang rutin di lapangan. Kualitas jalan, kualitas jembatan sama. Lembur- lembur memang, sampai tengah malam memang. Saya bertanya, sedang mengerjakan apa ? Jawab mereka, SPJ Pak.

Hal yang sama juga terjadi pada guru dan kepala sekolah. Pembuatan laporan SPJ sampai tengah malam. Saya pikir ini tengah menyiapkan kegiatan belajar mengajar bagi siswa. Sama, ternyata juga mengerjakan SPJ. Saya memerintahkan Menteri Keuangan untuk telusuri dan mengecek apa itu sebetulnya SPJ. Saya melihat semua birokrasi kita 60 persen sampai 70 persen energinya untuk mengerjakan SPJ.

Laporan Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) mengungkapkan bahwa banyak (waktu) dari para pimpinan proyek (nama dulu), sekarang (namanya) pengguna anggaran, itu untuk membuat laporan. Uangnya bisa dari kementerian lembaga, bisa dari pemerintah daerah. Itu bisa sampai 70 laporan (dibuat) dalam satu tahun anggaran. Saya bertanya kepada Ibu Menteri Keuangan, masa laporan sampai 16 laporan, ada yang 44 laporan. Ini apa, apakah dibaca?

Inefisiensi birokrasi kita salah satunya termasuk di sini. Sehingga saya perintahkan, tidak usah banyak-banyak Ibu Menteri. Dua saja saya kira cukup. Dari 44 laporan jadi dua cukup. Yang paling penting manajemen kontrol, manajemen pengawasan itu betul-betul konkret, riil di lapangan sehingga kalau ada apa-apa cepat ketemu. Mungkin kalau yang di birokrasi merasakan, karena kemarin saya sampaikan kepada kepala sekolah mengenai permasalahan ini. Mereka senang semuanya, bertepuk tangan. Kata para kepala sekolah, benar pak, hal tersebut memusingkan kita.

Yang terakhir adalah terpilihnya Presiden Donald Trump menjadi Presiden Amerika. Praktis seluruh mata uang di seluruh dunia melemah terhadap dollar AS. Bukan hanya rupiah, sekali lagi, bukan hanya rupiah. Bahkan, menurut saya, rupiah relatif stabil dibandingkan dengan mata uang yang lain. Dan ini yang dilihat saat kampanye, kebijakan Donald Trump untuk AmericaFirst, sama saja

dengan dollar nanti akan berjalan sendiri. Artinya apa? America First nanti berarti, Amerika Serikat relatif tidak peduli dengan konsekuensi aksinya terhadap negara yang lain. Saya menangkap seperti itu.

Sepertinya Trump akan menerapkan kebijakan ekonomi di mana kurs dollar semakin mencerminkan antisipasi pasar. Bahwa pertumbuhan ekonomi Amerika akan lebih menguat lagi dan inflasi dollar akan melonjak. Artinya apa? Artinya bahwa kurs rupiah dollar semakin tidak mencerminkan fundamental perekonomian Indonesia. Selama ini kita

selalu melihat ke sana terus. Padahal, bukan cerminan fundamental ekonomi Indonesia. Melainkan semakin mencerminkan, menurut saya, kebijakan ekonomi Amerika, yang tadi saya sampaikan, jalan sendiri.

Jadi, jangan dibawa persepsi nantinya, setelah ini, masih kita bawa persepsi itu pada dollar. Mestinya tidak seperti itu. Maaf kalau saya salah. Tapi yang saya lihat mestinya tidak seperti itu. Karena ekspor kita ke Amerika, kurang lebih mungkin 10-11 persen dari total ekspor kita. Jadi jangan sampai yang angka 10-11 persen ini mendominasi dalam persepsi ekonomi kita dalam kaitannya dengan dollar dan rupiah tadi.

Kalau kita mengukur ekonomi Indonesia hanya pakai dollar, nantinya kita akan kelihatan jelek. Padahal, negara lain juga mengalami hal yang sama. Padahal, ekonomi kita oke-oke saja, tidak ada masalah. Tapi sekali lagi, ini persepsi. Jika kita masih membawa itu bisa berbahaya. Sementara misalnya kalau kita ukur ekonomi kita pakai euro atau pakai yuan renminbi atau pakai Korean won atau pakai poundsterling mungkin akan berbeda. Dan mungkin akan kelihatan jauh lebih bagus. Tapi sekali lagi, kita sudah bertahun-tahun selalu melihat dollar dan rupiah. Sekali lagi, menurut saya kurs dollar dan rupiah bukan lagi tolok ukur yang tepat.

Seharusnya kurs yang relevan adalah kurs rupiah melawan mata uang mitra dagang kita, terutama mitra dagang terbesar kita. Kalau mitra dagang kita, China yang besar, kursnya rupiah renminbi, itu relevan. Mestinya seperti itu. Kalau mitra dagang terbesar kita Jepang, kursnya yen. Sekali lagi, karena Amerika hanya sekitar 10 persen dari

total perdagangan kita. Dan kalau China, angka yang ada di saya 15,5 persen dari total perdagangan kita, Eropa 11,4 persen, dan Jepang 10,7 persen. Hal ini penting sekali untuk mengedukasi publik agar tidak lagi memantau kurs mata uang mereka terhadap dollar AS semata, tetapi mempunyai patokan yang lebih komprehensif.

Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, sekali lagi kami minta agar para ekonom memberikan kritik, saran, mengingatkan hal-hal yang berkaitan ekonomi makro dan ekonomi mikro! Apabila ada hal-hal yang keluar dari rel, silakan saja sampaikan kepada saya setiap saat, kapan pun, 24 jam saya terima dengan senang hati untuk perbaikan negara dan bangsa kita.

Terima kasih.

Joko Widodo

Presiden RI

# DINAMIKA GLOBAL DAN PELUANG INDONESIA MENGHINDARI “MIDDLE INCOME TRAP”

Chairul Tanjung

(Ketua Komite Ekonomi Nasional 2009-2014, Menteri Koordinator  
Perekonomian Nasional 2014)

EKONOMI Indonesia adalah sebuah entitas terbuka di mana kita terlibat dalam perdagangan dengan hampir semua negara di dunia dan memberi jalan seluas-luasnya bagi investasi asing ke Indonesia. Hal ini mengantarkan ekonomi Indonesia menjadi sebuah entitas yang masuk ke dalam jajaran kelompok dua puluh ekonomi terbesar di dunia (G-20). Dalam skala perdagangan, ekonomi Indonesia terus berkembang selama beberapa dekade terakhir ini. Volume ekspor Indonesia ke pasar dunia mampu menembus angka 200 miliar dollar AS di tahun 2011 walaupun beberapa tahun setelahnya kinerja ekspor Indonesia terus menurun karena harga-harga komoditas mengalami penurunan yang cukup tajam.

Pada saat yang sama, volume perdagangan dunia meningkat tiga kali lipat selama dua dekade, yakni pada periode 1990 sampai 2010. Sementara itu, investasi global pada periode tersebut meningkat tidak kurang dari tujuh kali lipat. Jadi jelas bahwa setiap negara yang tidak terlibat dan tidak berpartisipasi dalam dinamika ekonomi dunia tersebut akan tertinggal dan terisolasi secara ekonomi serta akan berada di luar arus utama (mainstream).

## **Dinamika Global**

Di antara kawasan-kawasan dunia, saat ini Asia adalah kawasan yang paling dinamis dan menentukan dinamika/arah ekonomi global. Meskipun kawasan ini menghadapi tantangan yang cukup berat (karena harga-harga komoditas rendah, pertumbuhan dunia menurun, dan arus balik modal global), kawasan Asia mampu memberikan kontribusi sangat besar, paling tidak 60 persen dari total pertumbuhan ekonomi dunia. Di sisi lain, Asia merupakan kawasan dengan

pertumbuhan ekonomi tertinggi di kisaran 6 persen per tahun.

Mesin pertumbuhan utama Asia adalah China, ekonomi besar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Selain itu, ada India yang juga dipercaya akan menjadi pilar pertumbuhan ekonomi Asia. ASEAN merupakan lokomotif baru pertumbuhan Asia. Dengan lebih dari 600 juta jiwa penduduk, ASEAN adalah sebuah pasar yang besar dan ekonomi negara-negara anggotanya mampu bertumbuh tinggi, 5-7 persen per tahun.

Krisis yang melanda ekonomi Eropa dan Amerika Serikat, yang merupakan pasar utama produk-produk China, telah menyebabkan permintaan terhadap output industri manufaktur China turun drastis. Bahkan, sampai saat ini ekonomi Eropa belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Akibatnya, ekonomi China pun terjerembab di kisaran 6 persen yang merupakan angka terendah dalam 26 tahun terakhir. Setali tiga uang, ekonomi negara-negara ASEAN yang merupakan pemasok komoditas sebagai bahan baku industri di China pun mengalami guncangan.

Pemerintah Tirai Bambu sadar bahwa mereka harus merancang ulang strategi ekonominya. Mereka ingin memanfaatkan besarnya potensi pasar domestiknya dengan 1,3 miliar penduduk yang lambat laun akan memudar seiring hilangnya bonus demografi yang mereka miliki. Selain itu, China sepertinya akan mengikuti jejak Jepang dan Korea Selatan dengan mentransformasi industri manufakturnya dari labour intensive menjadi high-value added industry.

Di sisi lain, kemunculan para pemimpin baru di Eropa dan AS yang cenderung proteksionis seakan-akan menjadi langkah mundur bagi upaya integrasi kawasan guna mendorong transaksi perdagangan dan investasi yang telah diupayakan banyak negara sejak lama. Integrasi kawasan telah dianggap sebagai biang keladi bagi hilangnya lapangan pekerjaan bagi rakyatnya, menyusutnya pasar bagi perusahaan nasional, dan berujung hilangnya kedaulatan sebuah negara.

## **Peluang bagi Indonesia**

Meskipun skala ekonomi Indonesia sudah demikian berkembang, keterlibatannya dalam perdagangan dan investasi global masih terbatas. Tingkat pertumbuhan ekonomi nasional selama beberapa

dekade hanya mengikuti siklus harga komoditas andalan seperti minyak bumi di era 1970-1980-an, kayu dan hasil hutan di era 1990-an, batu bara dan komoditas perkebunan di era 2000-an. Sementara itu, ekspor produk industri yang bernilai tambah masih sangat kecil. Dengan demikian, potensi kita masuk ke dalam jebakan negara-negara berpendapatan menengah ada di depan mata, terutama saat ada faktor eksternal menghambat kinerja ekspor komoditas kita.

Berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sebagai sebuah integrated consumer market dan production base tepat setahun yang lalu merupakan sebuah momentum bagi kita untuk berbenah secara internal. Saya sebagai pelaku dunia usaha berharap agar Indonesia tetap berada di jalur mainstream dinamika ekonomi kawasan Asia Tenggara. Perusahaan-perusahaan nasional kita, baik BUMN maupun swasta nasional, harus mampu menangkap peluang dari besarnya pangsa pasar ASEAN dan bukan membiarkan negara kita menjadi pasar bagi perusahaan asing. Untuk mewujudkannya ada beberapa hal yang mendesak untuk dilakukan:

Pertama, Indonesia tidak bisa tidak, mutlak, mesti melakukan reformasi birokrasi dan kelembagaan negara yang memungkinkan pelayanan efisien, hilangnya hambatan bagi dunia usaha, dan terciptanya iklim usaha kondusif untuk investasi. Untuk itu, deregulasi dan debirokratisasi mesti terus dijalankan untuk menopang dunia usaha yang semakin besar dan matang.

Mirip yang terjadi di Amerika Latin, kebijakan industri dan kelembagaan di dalam pemerintahan kita belum mampu mendukung terciptanya lingkungan bisnis yang kondusif bagi dunia usaha. Hal ini mengakibatkan target industrialisasi yang dicanangkan pemerintah selalu layu sebelum berkembang. Proses industrialisasi memerlukan komitmen dan sinergi dari segenap pihak karena memerlukan waktu cukup panjang untuk mewujudkannya. Tanpa hal tersebut, kawasan yang sedianya dirancang sebagai kawasan industri akan berubah sekejap menjadi pusat konsumsi.

Di samping itu, saat China sedang mengubah haluan sektor industri menuju industri yang lebih berteknologi tinggi di sinilah peluang bagi Indonesia untuk mengambil alih sebagian pangsa pasar industri padat karya yang ditinggalkan oleh China.

Kedua, Indonesia sangat tertinggal dan sangat kurang dalam membangun infrastruktur. Ketertinggalan ini harus dibayar dengan

menjalankan percepatan program pembangunan infrastruktur untuk menopang investasi dan dunia usaha pada umumnya. Dengan dukungan infrastruktur ini, biaya logistik yang mahal diharapkan menjadi lebih murah dan efisien.

Ketiga, adalah keharusan negara untuk melakukan investasi sumber daya manusia, khususnya untuk mencetak tenaga-tenaga terampil dan produktif yang diperlukan industri. Investasi dalam sumber daya manusia adalah suatu keharusan, yang tidak bisa ditawar agar industri, pelaku usaha, dan manusia Indonesia mampu memenangi persaingan di tingkat global.

Sebagai penutup, di tengah ketidakpastian global kita harus pandai-pandai membaca peluang yang bisa kita manfaatkan untuk mengubah keadaan bangsa dan negara ke depan. Dengan potensi kenaikan harga komoditas di tahun ini, kita tidak bisa lagi terlena menggenjot ekspor bahan mentah semata untuk kepentingan jangka pendek pertumbuhan ekonomi. Awal tahun ini juga menandai setahun berlakunya MEA yang kita percaya bisa membuka pasar perdagangan dan arus investasi di kawasan ASEAN. Hal ini hendaknya kita jadikan sebuah momentum untuk berbenah, terutama untuk mendorong pertumbuhan sektor industri, percepatan proyek-proyek infrastruktur, dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia Indonesia. o

# Pengantar

ALHAMDULILLAH, setelah melalui proses yang cukup panjang dan berliku, buku Menuju Ketangguhan Ekonomi: Sumbang Saran 100 Ekonom Indonesia ini dapat selesai. Buku ini merupakan salah satu dokumentasi dari acara ritual Indef, Proyeksi Ekonomi Indonesia (PEI), setiap akhir tahun. Proyeksi Ekonomi Indonesia 2017 untuk pertama kalinya dikemas dalam suatu acara “Sarasehan 100 Ekonom Indonesia” yang dilaksanakan pada 6 Desember 2016 di Jakarta. Buku ini sedianya akan diselesaikan sebelum acara sarasehan, suatu obsesi ideal yang tidak terlalu mudah untuk diwujudkan. Alasannya pun logis, terutama karena 100 ekonom yang menjadi kontributor buku ini adalah para high-flyers, nama besar bidang ekonomi, baik sebagai ilmuwan, pelaku usaha, pejabat Negara, maupun perumus kebijakan sekian dekade terakhir di Indonesia.

Acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia berlangsung sangat sukses, dihadiri tidak kurang dari 200 orang. Presiden Joko Widodo berkenan hadir dan menyampaikan makalah kunci yang cukup menyegarkan. Format sarasehan cukup rileks, friendly, mengalir lancar, tapi berbobot, dikemas dalam suatu talk show khas Economic Challenges di MetroTV. Diawali oleh para peneliti Indef yang menyampaikan fakta dan data plus pernyataan dan isu pembuka pada setiap tema besar yang dibahas, lalu diikuti oleh pemikiran dan sumbang saran para ekonom, kemudian diakhiri oleh pejabat pemerintah. Selain Presiden, hadir dan turut berdiskusi beberapa menteri bidang ekonomi: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri

Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perencanaan Pembangunan/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang P. Brodjo- negoro, dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D. Hadad. Menteri- menteri lain yang hadir, tapi tidak ikut berdiskusi adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Sekteraris Negara Pratikno.

Proses penyusunan buku Menuju Ketangguhan Ekonomi: Sumbang Saran 100 Ekonom Indonesia ini menarik juga untuk dicatat. Ada ekonom yang amat semangat menyampaikan pokok-pokok

pemikirannya, ada yang terkesan amat hati-hati, dan ada yang biasa-biasa saja. Sumbang saran ekonom ini sebagian besar ditulis oleh 100 ekonom yang hadir saat sarasehan, ditambah dengan mereka yang sudah memberikan konfirmasi untuk hadir, tetapi akhirnya tidak dapat hadir karena suatu dan lain hal. Proses meminta dan mengingatkan mereka untuk segera mengirimkan tulisan pendek benar-benar bukan pekerjaan mudah. Alhamdulillah, kami di Indef memiliki beberapa cara untuk melakukan hal tersebut. Beberapa cerita lucu dan menggelikan menjadi bagian tidak terpisahkan dari buku ini. Saat tenggat waktu yang telah ditentukan, beberapa ekonom senior belum juga mengirimkan tulisannya. Kami tentu menyiapkan pengganti penulis, yaitu para peneliti muda Indef, agar mencapai 100 ekonom sebagaimana menjadi branding buku ini. Ternyata, setelah tenggat waktu terlewat satu hari, para ekonom senior itu mengirimkan artikelnya. Kami tentu tak tega untuk tidak menerima tulisan yang dikirim terlambat tersebut. Kami juga tidak sampai hati jika harus membuang tulisan para ekonom muda Indef, apalagi tulisan-tulisan tersebut cukup bagus. Jadilah total tulisan yang termuat dalam buku ini berjumlah 100 lebih sedikit.

Sebagaimana pembagian kelompok kerja pada waktu sarasehan, sistematika dalam buku juga menggunakan empat tema besar untuk menguji ketangguhan ekonomi Indonesia, yaitu:

- (1) kredibilitas fiskal,
- (2) produktivitas dan daya saing,
- (3) likuiditas perekonomian, dan
- (4) kualitas pertumbuhan ekonomi.

Tulisan disajikan dengan prinsip-prinsip penulisan ilmiah-populer, dengan catatan kaki atau pustaka yang tidak terlalu ekstensif dan kaku, tapi tidak menghilangkan unsur akademik dan objektivitasnya. Jumlah kontributor pada setiap tema besar tidak sama, tapi juga tidak terlalu berbeda banyak. Ekonom yang mengirimkan tulisan atau sumbang saran pada tema kualitas pertumbuhan ternyata paling banyak, yang sekaligus menandakan bahwa perhatian mereka terhadap ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran masih cukup besar. Setelah melewati diskusi yang cukup panjang akhirnya diputuskan bahwa penyajian sumbang saran 100 ekonom ini diurut berdasarkan abjad nama. Kebetulan sekali bahwa ide-ide yang disampaikan tidak terkesan melompat terlalu jauh dari satu bab ke bab berikutnya sehingga alur argumen dan sistematika gagasan di

buku ini masih dapat mengalir lancar dan cukup smooth. Semoga sumbang saran para ekonom mampu memberikan pencerahan kepada masyarakat luas, kepada akademisi, kepada dunia usaha, dan kepada perumus kebijakan di negeri ini.

Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada 100 ekonom Indonesia yang telah berkontribusi pada buku ini, yang telah hadir pada sarasehan, baik pada sesi pleno maupun sesi kelompok kerja. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Penerbit Buku Kompas yang berkenan menerbitkan dan menyebarkannya kepada masyarakat luas; juga kepada Mbak Ninuk Mardiana Pambudy, wartawan senior Kompas, yang membantu memfasilitasi dan menjembatani upaya penerbitan ini. Kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada para sponsor yang telah membantu pembiayaan penerbitan buku ini dan dalam penyelenggaraan sarasehan. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada para pembaca dan mitra Indef yang selama ini telah setia menemani perjalanan Indef.

Tiada gading yang tidak retak. Buku ini pun pasti masih memiliki kekurangan di sana-sini. Saran dan masukan konstruktif amat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga buku ini bermanfaat. Selamat membaca. o

Jakarta, 30 Desember 2016

Tim Indef

# PENDAHULUAN



## **1.1. Kredibilitas Fiskal**

Kredibilitas kebijakan fiskal akan terbukti dengan sendirinya pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 setelah kebijakan fiskal selama dua tahun terakhir mengalami ujian yang tidak ringan. Defisit keseimbangan primer meningkat nyaris tidak terkontrol karena belanja negara tidak produktif dan harus dibiayai oleh utang negara, apalagi pengelolaan utang tersebut sering menghadapi masalah penambahan mendadak pada akhir tahun. APBN yang direncanakan ekspansif pada tahun 2015 dan 2016 untuk membiayai sekian macam program pembangunan ternyata tidak mampu mencapai sasaran sesuai dengan rencana. Kebijakan amnesti pajak yang sempat dikhawatirkan implementasinya ternyata mampu meningkatkan tambahan penerimaan negara pada kuartal terakhir tahun 2016, walau belum memadai untuk mampu meningkatkan basis perpajakan pada tahun-tahun mendatang. Target-target APBN 2017 sebenarnya cukup rasional, misalnya menargetkan penerimaan pajak 13,5 persen dan menetapkan defisit APBN 2,5 persen dari produk domestik bruto (PDB). Rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) pada tahun 2017 sangat mungkin mendapat tekanan politik agak tinggi dan menimbulkan "keresahan" dari sebagian masyarakat. Pemerintah perlu lebih baik lagi dalam upaya menyampaikannya kepada masyarakat dan tetap fokus atau konsisten terhadap tujuan awal, yaitu untuk meningkatkan kredibilitas kebijakan fiskal.

Tantangan terbesar dalam kredibilitas kebijakan fiskal saat ini adalah kualitas belanja negara yang tidak terlalu baik, belum menunjukkan fungsi yang sebenarnya dalam suatu kebijakan fiskal, yaitu fungsi stabilisasi dan stimulus, fungsi alokasi, serta fungsi distribusi dan keadilan. Anggaran berbasis kinerja sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 (UU No. 17/2003) tentang Keuangan Negara belum menunjukkan pencapaian yang memuaskan, apalagi jika diharapkan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Pangsa atau share belanja negara terhadap PDB sekitar 9 persen.

Persoalannya adalah bagaimana pangsa 9 persen ini mampu menjadi stimulus investasi dan peningkatan permintaan agregat yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kuantitas pertumbuhan itu sendiri.

Fungsi alokasi dan fungsi distribusi dari suatu anggaran negara tidak akan dapat dilepaskan sepenuhnya dari proses politik karena penyusunan dan pembahasan APBN melibatkan parlemen dan politisi. Kredibilitas fiskal juga tidak akan dilepaskan dari perencanaan pembangunan, sebagaimana diatur dalam UU No. 25/2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Anggota parlemen juga dituntut untuk menyiapkan dan menyusun perencanaan pembangunan bersama-sama pemerintah, melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di pusat dan di daerah menjadi suatu kesatuan yang kredibel dan bertanggung jawab. Mekanisme dana alokasi khusus (DAK) untuk daerah yang lebih baik dan beradab diharapkan dapat meningkatkan kualitas belanja negara di pusat dan di daerah.

Hal yang perlu dicatat adalah bahwa DAK sering tidak sinkron dengan kebutuhan daerah sehingga pemerintah perlu lebih serius lagi dalam melaksanakan pengembangan kapasitas lokal dan kompetensi sumber daya manusia untuk meningkatkan kredibilitas fiskal dan reformasi kebijakan fiskal secara umum. Pemerintah belum pernah melakukan kajian evaluatif apakah belanja daerah atau transfer belanja dari pusat ke daerah selama satu setengah dekade dapat mengurangi kesenjangan antardaerah atau memperbaiki kesejahteraan daerah. Pada sisi lain, fakta yang tidak dapat terbantahkan adalah bahwa tingkat kesenjangan pendapatan semakin memburuk sejak era otonomi daerah pada tahun 2001 atau sejak terdapat dana transfer daerah yang amat besar.

Sementara itu, persoalan tentang dilema disinsentif pada dana alokasi umum (DAU) yang masih menggunakan indikator input, seperti jumlah orang miskin dan lain-lain yang berhubungan dengan kebutuhan fiskal. Jika indikator inputnya semakin baik, maka jumlah DAU akan mengecil, atau masih terdapat kecenderungan moral hazard di

beberapa daerah. Kredibilitas fiskal dapat diperbaiki apabila indikator DAU dirumuskan berdasarkan kinerja dan prestasi pembangunan sehingga banyak daerah yang akan berlomba-lomba mencapai kinerja yang dibutuhkan. Dari sinilah, kelak, ukuran yang diamanatkan dalam konteks anggaran berbasis kinerja atau performance-based budgeting (PBB) secara perlahan akan dapat dilaksanakan.

Sekali lagi, ruang fiskal dalam APBN Indonesia sebenarnya telah secara ideologis diatur dalam UU No. 23/2003 tentang Keuangan Negara, yang membatasi defisit 3 persen, uang total beredar sebesar 60 persen PDB. Dengan ketentuan yang cukup ketat tersebut, sebenarnya Indonesia masih memiliki ruang fiskal yang cukup lebar. Misalnya, pemerintah sebenarnya telah cukup berani mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dalam suatu ekspektasi ruang fiskal yang lebih baik. Reformasi fiskal perlu terus didorong, juga yang berhubungan dengan proses legislasi, seperti RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan RUU Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu segera diselesaikan pembahasannya karena telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang dijadikan prioritas.

## **1.2. Produktivitas dan Daya Saing**

Rendahnya produktivitas dan daya saing perekonomian Indonesia menjadi tantangan tersendiri, apalagi jika ingin masuk lebih dalam pada tataran global. Walaupun pemerintahan Jokowi-JK telah berupaya keras dengan sekian macam paket stimulasi kebijakan ekonomi untuk peningkatan produktivitas, daya saing Indonesia dalam ukuran Forum Ekonomi Dunia (WEF) terus menurun. Pada tahun 2014, Indonesia menduduki peringkat ke-34, kemudian turun menjadi ke-37 pada tahun 2015, dan kembali anjlok ke peringkat ke-41 pada tahun 2016. Bahkan, daya saing Indonesia sebagai negara berada jauh di bawah tetangganya di ASEAN, walaupun masih lebih baik dibandingkan dengan Filipina yang berada pada peringkat ke-57. Singapura berada di peringkat ke-2 di tingkat global atau memiliki daya saing tertinggi di ASEAN, disusul Malaysia (peringkat ke-25) dan Thailand (peringkat ke-34).

Dalam hal kemampuan inovasi, Indonesia tergolong negara yang tidak inovatif menurut INSEAD The Business School for the World 2016-2017. Indeks Inovasi Global yang dipublikasi oleh INSEAD menempatkan Indonesia pada peringkat ke-88, alias masih berada di papan bawah. Pada tahun 2014, peringkat Indonesia berada pada posisi ke-87, kemudian anjlok jauh sampai peringkat ke-97 pada tahun 2015, walaupun kemudian kembali ke kisaran sebelumnya. Hal yang cukup menarik dari publikasi WEF dan INSEAD adalah bahwa negara-negara yang memiliki daya saing tinggi adalah juga negara-negara yang memiliki inovasi tinggi. Peringkat 10 besar negara yang memiliki daya saing tinggi dan daya inovasi tinggi nyaris relatif sama. Swiss, misalnya, menempati peringkat pertama pada Indeks Daya Saing dan Indeks

Inovasi, Singapura berada pada peringkat ke-2 Indeks Daya Saing dan ke-6 pada Indeks Inovasi, Amerika Serikat ke-3 dan ke-4, Belanda ke-4 dan ke-9, Jerman ke-5 dan ke-10, dan lain-lain. Rendahnya daya saing dan daya inovasi Indonesia merupakan konsekuensi logis dari rendahnya anggaran penelitian dan pengembangan atau research and development (R&D), yang hanya 0,3 persen dari PDB, atau 13 kali lebih kecil dibandingkan dengan anggaran R&D di Korea Selatan, 10 kali lebih rendah dari anggaran R&D di Jepang, 8 kali lebih rendah dari R&D di Singapura, dan hampir 4 kali lebih rendah dari R&D di Malaysia.

Fenomena deindustrialisasi atau menurunnya peran sektor industri manufaktur terhadap PDB juga berkaitan dengan rendahnya produktivitas dan daya saing. Pangsa sektor industri terus menurun, dari 22 persen pada tahun 2010 menjadi 19,9 persen pada tahun 2016. Transformasi struktural biasanya ditandai oleh menurunnya pangsa sektor pertanian dan meningkatnya pangsa sektor industri dan jasa. Pangsa sektor pertanian menurun terus sampai 14,5 persen pada tahun 2016 seiring dengan semakin maju dan modernnya perekonomian negara. Pangsa sektor industri akan menurun setelah struktur perekonomian mulai tangguh dan meningkatnya peran sektor jasa. Di Indonesia, penurunan pangsa sektor industri manufaktur terjadi terlalu dini, bahkan sejak tahun 2000 yang mencapai 29 persen. Akibatnya, pangsa sektor tradable juga menurun, yang biasanya

diikuti oleh semakin rendahnya penyerapan tenaga kerja.

Di samping itu, industri manufaktur banyak berlokasi di Jawa sehingga terdapat ketimpangan dalam wilayah dan penyebaran sektor industri manufaktur di Indonesia. Pangsa sebaran kawasan industri di Jawa terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) 29,87 persen yang juga membentuk pangsa PDRB Jawa terhadap PDB Indonesia juga amat besar, sekitar 60 persen. Pangsa kawasan industri di Sumatera tercatat 15,6 persen yang membuat pangsa PDRB terhadap PDB nasional 23,8 persen. Ketimpangan kawasan industri secara regional ini perlu segera ditanggulangi karena amat sangat berhubungan dengan kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum (lihat uraian Sub-Bab

#### **1.4. Kualitas Pertumbuhan**

Ekonom juga menaruh perhatian khusus terhadap rendahnya produktivitas tenaga kerja Indonesia, apalagi di tingkat Asia. Indeks Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia berada pada posisi paling rendah (1,62 pada tahun 2016), sangat jauh dibandingkan dengan Indeks Produktivitas Tenaga Kerja di China 3,31, di India 2,14, di Vietnam 1,97,

dan di Thailand 1,73. Produktivitas tenaga kerja juga berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan karakteristik pendidikan kejuruan dan pendidikan tinggi yang masih banyak belum terintegrasi dengan pembangunan industri manufaktur. Sementara itu, pola pengajaran inovasi juga tidak menjadi acuan besar di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, karena perguruan tinggi semakin berpola pikir bisnis. Penelitian di perguruan tinggi banyak berhenti pada proses kenaikan pangkat, bukan pada kebijakan pengembangan industri. Di sisi lain, tidak ada insentif untuk industri untuk menggunakan hasil riset dari perguruan tinggi karena sampai saat ini tidak ada keuntungan bagi industri menggunakan hasil-hasil riset dari perguruan tinggi tersebut. Pemerintah seharusnya menjadi jembatan penghubung antara sektor pendidikan tinggi dan pembangunan industri di dalam negeri.

Bahkan, industri yang mengandalkan tenaga kerja dalam jumlah besar atau industri padat karya juga mengalami penurunan kinerja. Misalnya, industri pakaian jadi yang harus menanggung akibatnya karena ketergantungan terhadap bahan baku asal impor dan kesulitan menembus pasar global dalam skala besar. Secara umum, brand image Indonesia di pasar global masih rendah. Ekspor terbesar pada industri pakaian jadi ini justru pada pakaian seragam, yang jelas tidak memiliki brand khusus. Industri manufaktur lain yang mengalami deindustrialisasi adalah industri kayu, industri elektronik, dan industri percetakan.

Intinya adalah bahwa penelusuran akar masalah yang sebenarnya perlu diketahui dan dipetakan secara rinci karena karakter setiap industri cukup unik sehingga strategi penanggulangannya tidak dapat dipukul rata. Kemudian, strategi pengembangannya ke depan perlu mempertimbangkan dimensi spasial dan pewilayahan, apalagi kebijakan tata ruang wilayah memiliki dimensi ekonomi politik yang cukup kental. Rencana tata ruang wilayah perlu dirumuskan bersama anggota parlemen di daerah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Lambannya pewilayahan industri, terutama di luar Jawa, amat berhubungan dengan minimnya infrastruktur, tata ruang yang belum kondusif, serta sistem insentif, yang umumnya belum mampu menangkap dinamika yang ada.

Rendahnya produktivitas dan daya saing yang merupakan salah satu ciri dari proses deindustrialisasi juga merupakan konsekuensi dari ketidaksinkronan antarkementerian/lembaga. Kementerian seakan tidak memiliki target bersama untuk melakukan strategi pengembangan industri nasional. Akibatnya, integrasi hulu-hilir menjadi tidak mudah untuk dilaksanakan karena pola pikir sektoral dan parsial masih banyak mendominasi. Kembali pada perencanaan sumber daya manusia industri yang seharusnya dihubungkan dengan peta pengembangan kawasan industri di daerah sehingga sekaligus mampu mengembangkan potensi daerah dan peluang peningkatan daya saing perekonomian daerah.

Secara sederhana, peta sinkronisasi antarkementerian dalam pengembangan industri nasional dapat dirumuskan sebagai berikut. Kementerian Perindustrian tetap bertugas sebagai leading agency, bertugas meningkatkan nilai tambah atau hilirisasi dari suatu produk industri, melakukan inovasi dan peningkatan kualitas produk, perbaikan rantai pasok, dan lain-lain. Kementerian-kementerian seharusnya mendukung Kementerian Perindustrian untuk melakukan pembangunan industri nasional. Kementerian Perdagangan perlu mengembangkan sistem informasi pasar dan informasi produk yang akan dikembangkan. Kementerian Tenaga Kerja dan Badan Nasional Standardisasi Profesi (BNSP) mempersiapkan tenaga kerja terampil dan bersertifikat, Kementerian Keuangan merumuskan suatu sistem insentif pajak, dan Kementerian Pertanian menjamin ketersediaan pasokan bahan baku khusus bagi industri berbasis agro. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga ikut aktif memperbaiki iklim usaha dan regulasi perizinan yang lebih kondusif terhadap pembangunan industri nasional. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan ketersediaan energi (gas, minyak bumi, dan energi terbarukan). Kementerian Perhubungan memperbaiki konektivitas perekonomian secara umum.

Hal lain yang perlu dicatat adalah pada saat ini dan dalam jangka pendek ke depan fenomena Revolusi Industri 4.0 yang ditandai oleh revolusi digital dan industri kreatif akan mewarnai pembangunan sektor industri. Indonesia tidak memiliki kemewahan (luxury) untuk tidak mengantisipasi dan mengadopsi revolusi digital pada sektor industri. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sumber daya finansial menjadi hampir mutlak dilakukan jika tidak ingin ketinggalan kemajuan dan perubahan yang terjadi begitu cepat. Bahkan, tidak berlebihan untuk dikatakan bahwa pembangunan industri ke depan akan banyak mengandalkan inovasi dan perubahan teknologi maju, yang akan menjadi ciri khas abad industri digital dan abad industri kreatif saat ini.

### **1.3. Likuiditas Perekonomian**

Tahun 2017 akan ditandai oleh ketatnya likuiditas perekonomian, terutama karena defisit anggaran negara yang cukup besar, walaupun pemerintah telah menargetkan tidak lebih dari 2,5 persen dari PDB. Beban suku bunga obligasi, rasio pinjaman terhadap tabungan (LDR = loan to deposit ratio) telah mencapai 92 persen, ekspektasi laju inflasi yang lebih besar, stabilitas nilai tukar, dan dangkalnya pasar keuangan secara umum adalah beberapa tantangan likuiditas perekonomian yang mewarnai perjalanan tahun ketiga pemerintahan Jokowi-JK.

Selama tahun 2016, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) di sektor perbankan hanya 5,58 persen, yang lebih rendah daripada pertumbuhan kredit yang mencapai 6,65 persen. Benar bahwa penghimpunan DPK dipengaruhi oleh pelaksanaan amnesti pajak dan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Namun, sesuatu yang amat jelas adalah bahwa penyaluran kredit dipengaruhi oleh pelambatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan risiko sektor riil, yang masih terasa sampai kuartal ketiga tahun 2016. Dua implikasi amat penting dari ketatnya likuiditas adalah, pertama, fungsi intermediasi perekonomian dari sektor perbankan masih cukup rendah; dan kedua, koordinasi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter masih belum baik.

Pada instrumen pasar modal terdapat kecenderungan bahwa convertible bond tidak melalui BKPM sehingga data kepemilikan asing tidak terdeski secara lengkap oleh pemerintah. Pemerintah dan Bank Indonesia juga tidak secara penuh mampu memantau devisa hasil ekspor (DHE) sebagai konsekuensi dari karakter pasar valuta asing di Indonesia saat ini. Arus dana asing yang keluar-masuk juga menjadi risiko tersendiri, apalagi tidak semua perusahaan di Indonesia melakukan lindung nilai (hedging) dari investasi pasar modal tersebut.

Per 9 November 2016, perbankan memiliki SBN yang dapat diperdagangkan senilai Rp 435,13 triliun, atau naik 12,99 persen dibandingkan dengan posisi per 4 Januari 2016 (ytd). Porsi kepemilikan SBN rupiah oleh bank mencapai 24,73 persen dari total SBN rupiah yang dapat diperdagangkan. Kebijakan prefunding untuk belanja fiskal awal 2017 sebesar Rp 116 triliun. Dalam merealisasikan

strategi prefunding tersebut, pemerintah berencana menerbitkan SBN sekitar Rp 63,5 triliun. Namun, di sisi lain, yield yang ditawarkan SBN juga relatif tinggi (8-9 persen) sehingga perbankan juga harus mengeluarkan biaya tinggi dalam menghimpun dana. Waktu penerbitan SBN juga menjadi isu krusial karena sering berdekatan dengan penerbitan instrumen deposito atau surat utang bank.

Pasar uang antarbank (PUAB) sebenarnya dapat menjadi instrumen untuk memenuhi sumber pendanaan sebagaimana di negara-negara maju. PUAB di sana berfungsi sebagai pemenuhan likuiditas di luar simpanan dan deposito. Akan tetapi, di Indonesia, karakter efisiensi pasar uang tidak terpenuhi sehingga bank tidak saling meminjam. Dalam konteks ini, pendalaman pasar keuangan amat diperlukan, termasuk dalam jangka pendek, banyak yang dapat di-repo. Bank-bank kecil seharusnya akan tersegmentasi karena dari dulu pricing atau suku bunganya berada pada tingkat premium, 100-150 basis poin di atas suku bunga pasar. Setidaknya terdapat 118 bank, yang banyak mengandalkan DPK, dan seharusnya juga pinjaman antarbank. Suku bunga PUAB cukup fluktuatif sehingga Bank Indonesia perlu melakukan intervensi di pasar spot dan intervensi PUAB.

Keinginan Presiden Joko Widodo untuk menggunakan yuan China sebagai referensi tampaknya tidak akan terjadi dalam jangka pendek, di samping karena volume yuan China masih kecil, volume transaksi di tingkat global berkisar 60-70 persen menggunakan dollar AS. Pemerintah sebenarnya perlu lebih serius memikirkan alternatif sistem devisa bebas seperti saat ini, setidaknya agar pemerintah dan Bank Indonesia memiliki instrumen pasar yang lebih baik dibandingkan dengan para spekulan. Sekadar catatan, rezim devisa bebas yang diterapkan Indonesia diperkirakan masih akan berlaku sekian tahun ke depan sepanjang peraturan perundangannya belum direvisi. Apabila BI ingin menerapkan aturan pemantauan devisa hasil ekspor (DHE), hal tersebut tidak lebih dari imbauan moral saja. Ketentuan yang ditetapkan dalam UU No. 24/1999 tentang Lalu Lintas Devisa dengan jelas menyebutkan bahwa setiap penduduk bebas memiliki dan menggunakan devisa.

Salah satu faktor dari semakin mengecilnya DPK pada sistem perbankan Indonesia adalah tingkah laku dari eksportir Indonesia. Mereka meminjam uang dari perbankan di dalam negeri, tetapi pendapatan dana dari hasil ekspornya disimpan di bank asing. Akibatnya, banyak sekali dana atau devisa hasil ekspor tersebut yang disimpan di bank asing, bahkan yang berkedudukan di luar negeri. Beberapa penjelasan di atas telah lebih dari cukup untuk menggambarkan rendahnya fungsi intermediasi perbankan dalam negeri, yang juga menjadi determinan dari rendahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sebenarnya BI telah berusaha melakukan pendalaman pasar. Repo antarbank kini telah menggunakan giro wajib minimum (GWM). Sebelumnya repo ke BI saja, sekarang bisa antarbank. Mereka harus ada jaminan/kolateral. GWM primer seperti ini patut diapresiasi. Kebijakan BI tentang GWM sebesar 20 persen dari 6,5 persen, yaitu 5 persen di batas bawah GWM rata-rata. Masyarakat dan pelaku pasar masih menunggu dengan harap-harap cemas, apakah sekian macam instrumen ini mampu berkontribusi pada persoalan likuiditas perekonomian dalam sekian tahun mendatang.

#### **1.4. Kualitas Pertumbuhan Ekonomi**

Tantangan yang cukup berat menghinggapi perekonomian Indonesia adalah kualitas pertumbuhan ekonomi yang tidak terlalu baik. Pertumbuhan berkualitas ini sebenarnya merupakan konsep lama dalam dirkursus ekonomi pembangunan, tetapi memperoleh momentum pembahasan pascakrisis ekonomi Asia 1998, divergensi arah pembangunan ekonomi di negara-negara transisi ekonomi di Eropa Timur, dan krisis ekonomi global tahun 2008. Pertumbuhan ekonomi dianggap berkualitas apabila perekonomian tidak terlalu banyak dihindangi tiga persoalan besar: ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran. Salah satu pembahasan mendalam tentang kualitas pertumbuhan umumnya dikaitkan dengan kualitas belanja negara atau kebijakan fiskal yang tidak mampu menemukan dan memecahkan tiga persoalan di atas.

Di Indonesia, walaupun pada triwulan III tahun 2016 perekonomian mencatat pertumbuhan 5,02 persen, ketimpangan pendapatan masih besar dengan indeks gini 0,40, angka kemiskinan 10,7 persen, dan

pengangguran 5,6 persen. Pertumbuhan juga dianggap tidak berkualitas apabila dominasi sektor tradable yang seharusnya mampu menyerap tenaga kerja dan mengentaskan rakyat dari kemiskinan masih lebih rendah daripada sektor non-tradable yang sedikit menyerap tenaga kerja. Sektor pertanian sebagai salah satu sektor non-tradable ternyata hanya mencatatkan pertumbuhan 2,67 persen pada triwulan III tahun 2016, masih cukup jauh untuk mampu berkontribusi pada peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi.

Lambannya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran selama dua tahun terakhir pemerintahan Kabinet Kerja tidak dapat dilepaskan dari melebarnya ketimpangan pendapatan. Ketimpangan telah menjadi masalah yang amat sensitif dan amat dekat dengan instabilitas sosial-ekonomi-politik apabila tidak memperoleh penanganan yang serius dan sistematis. Ukuran ketimpangan ekonomi yang ditunjukkan oleh indeks gini atau rasio gini telah mencapai 0,40 atau meningkat 10 basis poin dari 0,30 pada 2000 atau sebelum era otonomi daerah. Tantangannya menjadi lebih serius karena pada era demokrasi dan otonomi daerah sekarang ini, kebijakan ekonomi yang ditempuh cenderung bervisi jangka pendek, bukan bervisi jangka panjang yang mengarah pada pembenahan struktural.

Karakter pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas juga terkonfirmasi dengan dominasi sektor non-tradable, yang tidak diimbangi kinerja sektor tradable yang masih tertatih-tatih, terutama pertanian dan industri manufaktur. Sektor tradable itu memiliki keterbatasan akses terhadap faktor produksi dan sumber daya strategis lain, buruknya infrastruktur ekonomi dan sumber daya produksi lain. Dalam hal distribusi kepemilikan aset, petani pangan yang memiliki lahan sempit (0,5 hektar atau kurang) kini diperkirakan telah mencapai 55 persen. Governansi yang buruk dalam pengelolaan subsidi pupuk juga membuka peluang terjadinya ketidakmerataan akses pada faktor produksi pertanian yang lain. Sekitar 65 persen petani miskin menerima 3 persen subsidi pupuk, tetapi 1 persen petani kaya menikmati 70 persen subsidi. Bahkan, sekitar 5 persen petani terkaya telah menikmati 90 persen subsidi pupuk yang selama ini justru terkesan amat tidak efektif.

Pembenahan sektor pertanian seharusnya mampu mengarah pada peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sektor pertanian masih menyerap lapangan kerja langsung sebesar 34 persen, dan banyak sekali tenaga kerja yang terserap secara tidak langsung pada sektor- sektor yang memiliki keterkaitan dengan sektor pertanian, seperti industri manufaktur, perdagangan, dan jasa-jasa lainnya. Apabila sektor pertanian beres, maka setengah persoalan ekonomi Indonesia beres. Pemerintah disarankan untuk membenahi secara total skema dimensi subsidi pupuk dan subsidi pertanian lainnya yang tidak tepat sasaran. Pemerintahan Jokowi-JK justru terlalu fokus pada peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai dan bahkan meningkatkan subsidi pupuk sampai Rp 31 triliun dengan persoalan struktural seperti disebutkan di atas. Saat ini masih terdapat kesempatan untuk membenahi subsektor pertanian lain yang mampu memberikan tambahan pendapatan langsung kepada petani, sekaligus mampu meningkatkan devisa negara, misalnya perkebunan dan hortikultura, plus tentu saja sektor perikanan.

# Produktivitas dan Daya Saing Indonesia dalam Konteks Demografi

Sonny Harry B. Harmadi



Dr. Sonny Harry B. Harmadi lahir di Mandai, Sulawesi Selatan, pada Mei 1975. Sejak Mei 2016, Sonny menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Kependudukan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sebelumnya, selama Mei 2009 hingga Juni 2016, Sonny mengemban amanah sebagai Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Sonny juga pernah dipercaya sebagai Staf Khusus Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional (Bappenas) selama Februari 2015-Februari 2016. Sonny menyelesaikan pendidikan doktor ilmu ekonomi di UI pada April 2005.

INDONESIA memiliki potensi besar dalam meningkatkan produktivitas dan daya saingnya. Hal ini didukung oleh kenyataan bahwa Indonesia sedang berada dalam periode bonus demografi (demographic dividend) sejak 2012. Sejak tahun 2012, rasio ketergantungan di Indonesia telah di bawah angka 50. Maknanya adalah bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung kurang dari 50 penduduk usia nonproduktif.

Berdasarkan proyeksi penduduk Bappenas (2013) diketahui bahwa rasio ketergantungan Indonesia akan mencapai titik terendah selama tahun 2028 hingga 2031. Periode ini disebut dengan jendela peluang (the window of opportunity). Karena ukuran bonus demografi adalah rasio antara penduduk usia nonproduktif dan penduduk usia produktif, maka sudah jelas bahwa bonus demografi berdampak terhadap produktivitas nasional.

Salah satu ukuran keberhasilan kita dalam memanfaatkan bonus demografi dan jendela peluang akan tecermin pada peningkatan standar kehidupan penduduknya, di mana produktivitas merupakan salah satu faktor penentunya (Ray, 1998; Todaro dan Smith, 2006; Mankiw, 2007). Penduduk suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa dalam jumlah besar per unit jam kerjanya akan mempunyai standar kehidupan rakyat yang tinggi. Syarat utama untuk dapat memetik bonus demografi ialah bahwa penduduk usia produktif harus sehat, cerdas, dan benar-benar produktif. Artinya, produktivitas bergantung pada investasi modal manusia, di mana pembangunan manusia membutuhkan waktu yang panjang.

Bonus demografi yang sedang dinikmati Indonesia memberikan harapan untuk meningkatkan produktivitas nasional di masa mendatang. Setidaknya ada tiga alasan. Pertama, rata-rata beban ketergantungan di setiap rumah tangga lebih rendah karena jumlah anak per keluarga semakin sedikit, orang tua memiliki kemampuan investasi yang lebih baik bagi anak mereka, khususnya gizi, pendidikan, dan kesehatan. Perbaikan kualitas modal manusia ini dalam jangka panjang akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Kedua, dengan jumlah anak yang lebih sedikit per perempuan, maka perempuan dapat masuk ke pasar kerja dan menggunakan sebagian waktunya untuk kegiatan produktif secara ekonomi, menambah pendapatan keluarga. Ketiga, beban rumah tangga yang semakin kecil menyebabkan rumah tangga memiliki kemampuan menabung yang lebih besar. Secara agregat, akumulasi tabungan nasional akan meningkat sehingga ketersediaan dana untuk investasi meningkat.

Dalam perjalanan pembangunan, 2045 menjadi milestone penting bagi Indonesia, di mana saat itu usia republik ini mencapai 100 tahun. Namun, proyeksi penduduk memperlihatkan bahwa periode bonus demografi kemungkinan besar akan selesai di tahun 2042, atau tiga tahun sebelum 2045. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk menganalisis periode bonus demografi sebagai persiapan memasuki tahun 2045.

## **Tantangan Kependudukan Indonesia**

Pada tahun 2015, hasil proyeksi penduduk Bappenas menunjukkan jumlah penduduk Indonesia mencapai angka 255,46 juta jiwa, sedangkan hasil proyeksi penduduk Lembaga Demografi menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia tahun 2045 akan mencapai 321,86 juta jiwa. Jika kedua proyeksi tersebut cukup akurat, berarti dalam 30 tahun mendatang akan ada tambahan jumlah penduduk sebesar 66,4 juta jiwa. Maknanya, jumlah penduduk kita akan bertambah sekitar seperempat dari jumlah penduduk Indonesia saat ini. Tentu tambahan lebih dari 66 juta penduduk dalam waktu 30 tahun menjadi tantangan tersendiri. Bandingkan saja dengan proyeksi tambahan penduduk Inggris dalam periode yang sama “hanya” sekitar 6 juta jiwa. Population Reference Bureau (2014) bahkan memproyeksikan jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 365 juta pada tahun 2050, yang artinya jumlah penduduk pada tahun 2045 diperkirakan mendekati 350 juta jiwa. Tahun 2050, peringkat Indonesia akan turun ke urutan ke-5 dalam hal jumlah penduduk, dikalahkan oleh Nigeria yang mengalami pertumbuhan penduduk sangat tinggi.

Menurut struktur umur, hal yang menarik untuk dicermati ialah adanya perbedaan rate of growth dari kelompok umur produktif dan nonproduktif di tahun 2045. Diperkirakan saat itu pertumbuhan penduduk usia 0-14 tahun akan mengalami pertumbuhan negatif (jumlahnya turun), penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan tumbuh 0,88 persen, sedangkan penduduk lansia (65 tahun ke atas) tumbuh sekitar 3,65 persen. Besarnya angka pertumbuhan penduduk lansia menjadi indikasi penting akan besarnya kebutuhan akan lansia itu sendiri, baik dalam hal infrastruktur pendukung, lapangan pekerjaan, maupun kebutuhan produk untuk menunjang kehidupan dan produktivitas lansia.

Rata-rata lamanya sekolah penduduk usia dewasa (25 tahun ke atas) berdasarkan Susenas 2014 baru mencapai 7,9 tahun atau setara hampir kelas II SMP. Belum lagi variasi antardaerah sangat tinggi terhadap data tersebut. Capaian tertinggi diraih oleh DKI Jakarta dengan angka 10,6 tahun (setara hampir kelas II SMA) dan terendah di Papua dengan angka 5,9 tahun (hampir lulus SD). Angka tersebut baru

sebatas kuantitas, belum mencakup kualitas pendidikan yang tentunya sangat bervariasi antardaerah. Jika membandingkan kondisi desa-kota, juga diketahui adanya kesenjangan yang cukup besar, di mana untuk kota angkanya mencapai 9,3 tahun, sedangkan desa hanya sekitar 6,6 tahun. Rendahnya tingkat pendidikan penduduk usia produktif tentu berdampak terhadap tidak optimalnya pemanfaatan bonus demografi.

Dalam hal kesehatan, risiko kematian ibu melahirkan masih tinggi karena beberapa hal, di antaranya kualitas antenatal care dan usia kawin pertama perempuan. Bisa dibayangkan bahwa masih ada 11 persen perempuan Indonesia yang menikah saat usianya di bawah 16 tahun (melanggar UU Perkawinan), dan 53 persen perempuan menikah ketika usianya belum 20 tahun (risiko tinggi dalam kehamilan dan melahirkan). Tidak mengherankan angka kematian ibu melonjak drastis dari 228 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2007 menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2012. Sungguh ironis bahwa seorang ibu justru menghadapi kematian di saat akan melahirkan suatu kehidupan baru. Rendahnya kualitas penduduk yang tercermin dari indikator kesehatan tentunya dapat berdampak pada rendahnya daya saing Indonesia.

Tingkat kesehatan yang tercermin dari usia harapan hidup memang terus meningkat. Hal ini tidak terlepas dari adanya kecenderungan penurunan angka kematian bayi (IMR). Bappenas memperkirakan usia harapan hidup akan naik dari 70,1 tahun (2010-2015) menjadi 72,2 tahun (2030-2035). Namun, angka kematian bayi relatif stagnan, hanya turun sedikit dari 34 per 1.000 kelahiran hidup di 2007 menjadi 32 per 1.000 kelahiran hidup di 2012. Dengan child survival rate yang rendah, tidak mengherankan jika masih banyak pasangan usia subur yang memilih untuk memiliki banyak anak.

Terkait dengan tabungan, data Bank Dunia (2011) menunjukkan bahwa hanya 20 persen orang dewasa di Indonesia yang memiliki rekening di lembaga keuangan formal. Data lainnya dari Survei Neraca Rumah Tangga BI (2011) menunjukkan bahwa terdapat 48 persen rumah tangga yang memiliki tabungan di bank, lembaga keuangan non-bank, dan non-lembaga keuangan. Sementara hasil survei Lembaga

Demografi di lima provinsi menunjukkan bahwa hanya 35,31 persen penduduk Indonesia yang pernah bersinggungan dengan bank. Ini menunjukkan rendahnya peran tabungan dalam optimalisasi bonus demografi. Ketiadaan tabungan berdampak terhadap munculnya potensi instabilitas finansial dan memperlamban kesejahteraan sosial, serta mengurangi peluang investasi yang bersumber dari pembiayaan tabungan domestik.

Dalam hal persebaran penduduk antarpulau, diketahui bahwa hingga 2035 tidak akan terjadi banyak perubahan di Indonesia. Penduduk masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sebagai perbandingan, di tahun 2015 ini diperkirakan hampir 57 persen penduduk Indonesia tinggal di Jawa, 22 persen di Sumatera, 6 persen di Kalimantan, dan 7 persen di Sulawesi. Pada tahun 2035 angkanya diperkirakan tidak jauh berbeda, di mana penduduk Jawa turun sedikit mendekati 55 persen, dan Kalimantan naik sedikit mendekati 7 persen. Meskipun mobilitas penduduk semakin tinggi, hal itu didominasi mobilitas nonpermanen.

Perubahan yang agak signifikan justru ditunjukkan oleh distribusi penduduk menurut desa-kota. Salah satu hal yang menarik untuk dicermati ialah adanya fenomena urbanisasi. Proporsi penduduk perkotaan di Indonesia akan terus meningkat dan semakin jauh melampaui penduduk perdesaan. Situasi ini tidak pernah dihadapi Indonesia sebelum tahun 2010. Di tahun 2015, Bappenas memproyeksikan 53,3 persen penduduk Indonesia tinggal di perkotaan, sedangkan di tahun 2035 jumlahnya akan mencapai hampir 67 persen. Belum lagi adanya perkiraan di tahun 2035 bahwa hampir 90 persen penduduk Jawa Barat akan tinggal di daerah perkotaan.

### **Tantangan Ketenagakerjaan Indonesia**

Di Indonesia, ketersediaan tenaga kerja (*supply*) yang ditunjukkan oleh jumlah angkatan kerja selalu lebih tinggi dibandingkan dengan kesempatan kerja yang tercipta. Hal ini terjadi secara merata di setiap provinsi. Pada tahun 2002, jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai 100,77 juta orang dengan kesempatan kerja hanya tersedia untuk 91,64 juta orang. Berarti saat itu ada sekitar 9,13 juta orang yang menganggur. Sementara di tahun 2015 terdapat 128,30 juta angkatan

kerja dengan jumlah kesempatan kerja mencapai 120,85 juta. Ada 7,45 juta orang yang menjadi penganggur di tahun lalu (5,81 persen).

Struktur lapangan kerja formal mengalami peningkatan selama periode 2009-2015. Proporsi pekerja formal meningkat dari 30,51 persen menjadi 42,06 persen dan informal turun dari 69,59 persen menjadi 57,94 persen. Pekerja yang kurang produktif, seperti pekerja bebas pertanian, bebas non-pertanian, dan pekerja keluarga tanpa upah, sudah menurun, tetapi jumlahnya masih besar dan sebagian besar adalah pekerja miskin. Dalam beberapa tahun terakhir memang terjadi perubahan struktur ketenagakerjaan Indonesia. Perlu diakui bahwa kualitas pekerjaan mengalami perbaikan. Pada Februari 2014-2015, jumlah pekerja formal meningkat 3,52 juta pekerja dan pekerja informal menurun 2,31 juta. Namun, kita tidak boleh melupakan bahwa perubahan definisi pekerja formal pada tahun 2013 memiliki andil dalam kenaikan tersebut.

Struktur pekerja di sektor industri mengalami perubahan, meskipun relatif kecil, dari 13,2 persen di tahun 2002 menjadi 13,42 persen di 2013. Sementara pekerja sektor pertanian menurun dari sekitar 43,0 persen tahun 2002 menjadi 34,35 persen tahun 2013. Selama periode 2013-2014, peningkatan kesempatan kerja mencapai angka 3,8 juta, tetapi masih terkonsentrasi di sektor informal, seperti perdagangan, jasa, dan konstruksi. Hanya sedikit pertambahan kesempatan kerja di sektor industri, yaitu sekitar 370.000 pekerja (9,7 persen kesempatan kerja baru). Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja untuk sektor produksi (tradable) yang terdiri dari pertanian dan industri manufaktur justru lebih rendah dibandingkan dengan sektor nonproduksi (non-tradable). Ini mengindikasikan masih besarnya beban sektor informal, di mana sektor ini justru memberi kesempatan kerja yang lebih besar dibandingkan dengan sektor formal.

Sebagai gambaran, selama periode 2013-2014, sektor industri manufaktur di Indonesia tumbuh 4,86 persen, tetapi pada saat bersamaan pertumbuhan kesempatannya hanya 2,49 persen. Sebaliknya, sektor konstruksi tumbuh 6,58 persen, dengan pertumbuhan kesempatan kerja mencapai 15,92 persen, di mana sebagian besar sektor ini diisi pekerja informal. Rendahnya kesempatan kerja di sektor formal menyebabkan beban sektor formal

yang berubah rendah menjadi besar. Hal ini mempersulit peningkatan kesejahteraan pekerja dan perlindungannya. Transformasi struktural ketenagakerjaan yang ditandai oleh penurunan proporsi pekerja pertanian justru beralih ke sektor informal nonpertanian dengan upah rendah.

Tahun 2013, sekitar 45,62 persen angkatan kerja di Indonesia hanya berpendidikan SD ke bawah, sedangkan yang berpendidikan SMP mencapai 18,73 persen. Berarti, jika digabungkan, sekitar 64 persen angkatan kerja kita berpendidikan SMP ke bawah. Hanya 6,78 persen angkatan kerja kita yang berpendidikan sarjana atau lebih tinggi. Hal lain yang perlu dicermati ialah tingginya angka pengangguran pada kelompok pendidikan SLTA (SMA dan SMK). Saat ini sekitar 11,16 persen lulusan SMA menganggur dan 9,74 persen lulusan SMK yang menganggur, dengan tren meningkat. Berdasarkan data BPS 2013, kenaikan upah antarjenjang pendidikan justru paling rendah dari SMP ke SMA. Jika seorang pekerja pendidikannya naik dari SD ke SMP, upahnya akan naik 121 persen, sedangkan pekerja yang pendidikannya naik dari SMP ke SMA upahnya hanya naik sekitar 49 persen. Lebih lanjut, lama mencari pekerjaan untuk lulusan SMP hanya 1,8 bulan, sedangkan lulusan SMA bisa menghabiskan waktu hingga 5,1 bulan hanya untuk mencari pekerjaan. Hal ini dapat menciptakan disinsentif bagi pekerja untuk meningkatkan pendidikannya hingga ke taraf SMA/ SMK.

Meskipun penting, pendidikan bukanlah satu-satunya faktor yang dapat meningkatkan produktivitas. Keterampilan pekerja juga memiliki peran penting. Beberapa keterampilan yang dibutuhkan antara lain penguasaan bahasa asing (khususnya bahasa Inggris) dan kemampuan penguasaan komputer serta teknologi informasi. Kita juga perlu mengatasi fenomena sticky floor yang menunjukkan adanya hambatan akses pekerjaan untuk memperoleh upah lebih tinggi bagi kelompok berpendapatan rendah. Selain itu, pemerintah perlu memberikan insentif bagi employer yang bersedia memberikan basic skills training bagi pekerjanya. Pelatihan dalam dunia kerja tidak hanya diperlukan dalam rangka mempersiapkan calon pekerja baru, tetapi juga bagi mereka yang sudah (lama) bekerja. Perkembangan teknologi yang sangat dan semakin cepat berarti semakin singkatnya

daur hidup berbagai produk. Ini berarti keterampilan dan pengetahuan yang mereka (tenaga kerja) miliki sebagai cadangan (stock) pengetahuan juga semakin cepat menjadi usang. Hanya 5 persen dari pekerja yang memperoleh pelatihan dan hanya 4 persen dari penganggur yang pernah menerima pelatihan, yang berdampak sebagian besar tenaga kerja kita memiliki keahlian rendah (Sakernas 2014). Pelambatan keterampilan pekerja menyebabkan produktivitas tenaga kerja secara keseluruhan rendah, termasuk dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN.

Dari gambaran di atas, tampak bahwa kondisi ketenagakerjaan yang dimiliki Indonesia di masa depan ditentukan oleh karakteristik aktivitas produksi yang berjalan pada saat itu. Jenis kegiatan produksi yang berjalan menentukan jenis tenaga kerja yang diperlukan. Karena itu, gambaran tersebut juga menyiratkan kompleksitas dan sifat multidimensi dari persoalan ketenagakerjaan yang dihadapi Indonesia saat ini.

### **Langkah ke Depan**

Memasuki 2045, Indonesia tidak lagi berada dalam periode bonus demografi. Berbagai literatur menunjukkan bahwa setiap negara yang telah melampaui periode bonus demografi dapat memanfaatkan bonus demografi tahap *dua (the second demographic dividend)*. Syaratnya, warga lansia tetap produktif dan berkontribusi dalam kegiatan ekonomi serta memiliki tabungan yang cukup. Namun, masalahnya, warga lansia di 2045 adalah mereka yang lahir pada generasi 1985 dan sebelumnya. Faktanya saat ini kualitas mereka rendah dan kelak mereka juga akan menjadi warga lansia berkualitas rendah. Transformasi struktural ekonomi juga terhambat, di mana terjadi deindustrialisasi dini dan pada gilirannya kita akan terjebak pada sektor-sektor yang sifatnya non-tradable. Bagaimanapun juga, negara sebesar Indonesia harus tetap mengedepankan sektor industri manufaktur sebagai motor penggerak pembangunan dalam penciptaan kesejahteraan.

Tidak ada pilihan, kita harus betul-betul memanfaatkan periode bonus demografi yang telah berlangsung sejak 2012. Kesalahan kebijakan dapat menggagalkan kita dalam mengoptimalkan bonus demografi.

Beban pensiun dan jaminan hari tua pasca-2045 akan sangat besar. Mereka dapat menanggung hari tuanya jika saat ini benar-benar produktif, di saat mereka berada dalam usia produktif. Maka, tugas kita saat ini ialah mendorong mereka yang sudah produktif untuk lebih produktif; dan mendorong penduduk usia produktif tetapi tidak produktif untuk produktif. Agar dapat memanfaatkan peluang bonus demografi secara optimal, kita perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini.

1. Produktivitas dan daya saing nasional dapat meningkat dengan cepat jika kita mampu memanfaatkan peluang dan momentum bonus demografi selama periode 2012-2042. Sudah jelas bahwa indikator yang digunakan dalam menghitung bonus demografi terkait produktivitas penduduk.
2. Harus ada keberpihakan kebijakan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional, khususnya bagi kelompok pendapatan rendah. Bagaimanapun juga, 40 persen penduduk dengan kondisi ekonomi terbawah membutuhkan intervensi pemerintah secara tepat. Hal ini sejalan dengan berbagai program penanggulangan kemiskinan dan program perlindungan sosial yang sedang dilaksanakan pemerintah. Percepatan peningkatan produktivitas kelompok penduduk berpendapatan rendah akan mengurangi kesenjangan/ ketimpangan pendapatan antarpenduduk.
3. Mengingat kesehatan penduduk berdampak pada produktivitas, maka upaya perlindungan kesehatan yang bersifat kuratif melalui program Indonesia Sehat juga harus diimbangi dengan gerakan hidup sehat yang bersifat promotif dan preventif. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah melakukan tugas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang kesehatan, antara lain dengan mendorong terlaksananya Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) dan program Rumah Sehat.
4. Ada dua kunci utama peningkatan pertumbuhan pendapatan per kapita, yakni dengan (i) mendorong pertumbuhan ekonomi; dan (ii) menekan pertumbuhan penduduk. Maka, peningkatan

produktivitas tidak terlepas dari keberhasilan kita menjalankan program Keluarga Berencana.

5. Produktivitas dan daya saing penduduk tidak cukup hanya dengan mendorong peningkatan pengetahuan, tetapi juga keterampilan (skill). Oleh karena itu, pendidikan vokasi yang saat ini menjadi program prioritas pemerintah sangat strategis bagi Indonesia. Kita ingin menghasilkan lulusan dengan menitikberatkan pada kemampuan keterampilan (skill). Tentunya hal ini harus sesuai dengan kebutuhan pembangunan sektoral jangka panjang.